



WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 7 NOMOR 1 (MEI 2026)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE)

ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK)

DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI BALI: PERSPEKTIF FISKAL, EKONOMI, DAN INVESTASI

Ni Putu Esti Pramita Ningrum^{a*}, Gede Crisna Wijaya^b, Made Dwi Setyadhi Mustika^c

^{a,b,c}Universitas Udayana, Badung, Bali, Indonesia

*ningrum.2207511138@student.unud.ac.id

Diterima: Januari 2026. **Disetujui:** April 2026. **Dipublikasikan:** Mei 2026.

ABSTRACT

This study analyzes the influence of realized Locally-Generated Revenue (PAD), Gross Regional Domestic Product (GRDP), Regency/City Minimum Wages (UMK), and investment on the Human Development Index (HDI) across regencies and cities in Bali Province. The study utilizes panel data covering the 2018–2024 period. Data were obtained from the Directorate General of Fiscal Balance, Statistics Indonesia (BPS), and the Manpower Office. Analysis was conducted using a panel data regression approach to identify relationships between the research variables. The results indicate that, simultaneously, realized PAD, GRDP, UMK, and realized investment have a significant impact on the HDI in Bali Province. Individually, GRDP and UMK were found to have a positive and significant influence on the HDI, whereas realized PAD and investment showed a positive trend but did not exert a statistically significant influence. These findings are expected to serve as a reference for local governments in formulating development policies aimed at improving the community's quality of life by strengthening economic growth, enhancing workforce welfare, and optimizing the management of regional resources.

Keywords: Realization of PAD, GRDP, UMK, Investment, HDI.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta investasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian memanfaatkan data panel periode 2018–2024. Data penelitian diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Ketenagakerjaan. Analisis dilakukan melalui pendekatan regresi data panel untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara simultan realisasi PAD, PDRB, UMK, dan realisasi investasi berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Bali. Secara individual, variabel PDRB dan UMK terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan realisasi PAD serta investasi menunjukkan arah positif namun belum memberikan pengaruh yang signifikan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya daerah.

Kata Kunci: Realisasi PAD, PDRB, UMK, Investasi, IPM.

I. PENDAHULUAN

Secara umum, pembangunan merujuk pada upaya transformasi yang disusun melalui perencanaan matang dan mencakup berbagai upaya untuk mewujudkan perubahan yang terencana guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat di masa mendatang (Lestari *et al.*, 2021; Fitria, 2024). Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya meningkatkan pembangunan ekonomi. Namun, pembangunan ekonomi yang kuat harus selaras dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks pembangunan manusia, teori *Human Capital* (Becker, 1993:98) menjelaskan bahwa pengeluaran untuk pengembangan kualitas individu seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan akan memperkuat kapasitas produktif seseorang dalam mengakses pendapatan dan standar hidup yang lebih baik. Selain itu, teori fungsi pemerintah menurut Musgrave (1989:7) menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan pendapatan, dan menstabilkan ekonomi untuk memastikan tercapainya pembangunan manusia secara merata. Selain itu, teori Pembangunan Ekonomi oleh Todaro & Smith (2012:5) memandang pembangunan sebagai proses multidimensional yang lebih dari sekadar berfokus pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan manusia dapat diukur melalui suatu kerangka pengukuran yaitu *Human Development Index (HDI)* yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dan dikenal di Indonesia sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menunjukkan kondisi kualitas hidup masyarakat yang dinilai dari tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak (Astari & Chotib, 2024; Karimah *et al.*, 2024). Badan Pusat Statistik (2025) mengelompokkan nilai IPM ke dalam empat kategori, yaitu rendah dengan nilai di bawah 60, sedang pada rentang 60 hingga kurang dari 70, tinggi pada rentang 70 hingga

kurang dari 80, serta sangat tinggi apabila nilainya mencapai 80 atau lebih. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2024), IPM di Indonesia masih mengalami ketimpangan antar provinsi. Hal tersebut mencerminkan adanya disparitas dalam akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta standar hidup yang layak.

Struktur perekonomian Provinsi Bali memiliki karakteristik yang unik dibandingkan daerah lain di Indonesia (Radityana *et al.*, 2023). Sebagian besar pendapatan masyarakat di Provinsi Bali berasal dari aktivitas pariwisata yang rentan dengan guncangan eksternal, sementara sektor lainnya berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi (BPS Provinsi Bali, 2025). Nilai PDRB Bali atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai 298,44 triliun rupiah pada tahun 2024, meningkat Rp24,08 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp274,36 triliun. Peningkatan ini masih ditopang oleh pariwisata Bali yang telah kembali ke kondisi normal setelah mengalami pertumbuhan signifikan pasca pandemi COVID-19 (BPS Provinsi Bali, 2025). Namun, aktivitas pariwisata di Provinsi Bali masih terpusat di wilayah selatan seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar (BPS Provinsi Bali, 2024).

Menurut data BPS Provinsi Bali (2025), sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih didominasi oleh wilayah Sarbagita, yaitu Badung 25,72 persen, Denpasar 25,55 persen, Gianyar 23,76 persen, dan Tabanan 20 persen, sementara wilayah Non-Sarbagita seperti Karangasem 9,72 persen dan Buleleng 17,08 persen, yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Sarbagita. Selain itu, analisis *Location Quotient* (LQ) untuk basis kegiatan pariwisata yang mendapatkan skor LQ >1 hanya Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar. Perbedaan sektor ekonomi antara wilayah Sarbagita dan Non-Sarbagita dapat memengaruhi ketersediaan infrastruktur yang berdampak kepada akses pendidikan dan kesehatan. Hal ini terlihat dari masih adanya keterbatasan akses di beberapa kabupaten dan kota terkait jalan, fasilitas kesehatan, dan layanan pendidikan (Santika & Anandari, 2025).

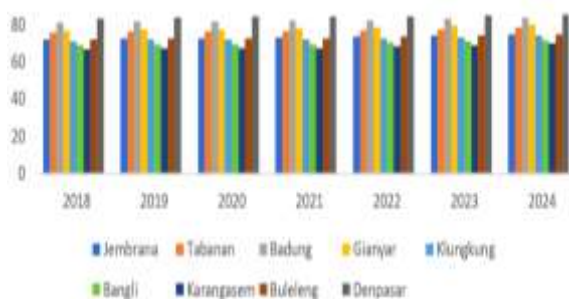
Dengan capaian IPM yang tergolong tinggi, Provinsi Bali memperlihatkan tren perkembangan yang positif setiap tahunnya.

Tabel 1 Perkembangan IPM Provinsi Bali Tahun 2018–2024

Tahun	IPM Provinsi Bali	Peringkat Nasional
2018	74,77	5
2019	75,38	5
2020	75,50	5
2021	75,69	5
2022	76,44	5
2023	77,10	5
2024	77,76	5

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel di atas menunjukkan IPM Provinsi Bali mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2018–2024. Namun demikian, peningkatan nilai IPM tersebut tidak diikuti oleh perubahan peringkat secara nasional, di mana Provinsi Bali tetap berada pada posisi ke-5 selama periode tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kualitas pembangunan manusia di Provinsi Bali cenderung sejalan dengan provinsi lain, sehingga belum mampu meningkatkan daya saing relatifnya secara nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun capaian IPM Bali tergolong tinggi, peningkatan yang terjadi belum cukup kuat untuk mendorong perubahan posisi dibandingkan provinsi lain.



Gambar 1. IPM Kabupaten Kota Provinsi Bali Tahun 2018-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Provinsi Bali masih menghadapi tantangan pada capaian IPM tingkat kabupaten dan kota yang belum merata (Badan Pusat Statistik, 2024). Pada gambar di atas, terlihat bahwa wilayah selatan seperti Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan menduduki peringkat atas, sedangkan kabupaten lainnya memiliki capaian IPM

yang lebih rendah. Capaian yang lebih rendah tersebut dipengaruhi oleh perbedaan struktur perekonomian antar wilayah, di mana aktivitas ekonomi dan sumber pendapatan daerah cenderung terkonsentrasi pada sektor dan wilayah tertentu, terutama sektor yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata yang terkonsentrasi di wilayah selatan seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar, sementara wilayah berbasis pertanian seperti Bangli dan Karangasem memiliki kapasitas ekonomi yang lebih terbatas (Aswin & Yasa, 2021). Perbedaan struktur ekonomi antar wilayah dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga berimplikasi pada perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar kepada masyarakat (Suparman & Muzakir, 2023).

Perbedaan capaian tersebut juga tidak terlepas dari peran realisasi PAD, PDRB, UMK, dan investasi. Capaian antar kabupaten/kota juga menunjukkan adanya variasi dalam efektivitas instrumen fiskal dan ekonomi tersebut. Hasil kajian empiris menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel ekonomi daerah terhadap IPM belum menghasilkan temuan yang konsisten khususnya pada variabel realisasi PAD dan investasi. Sejumlah penelitian menemukan pengaruh signifikan terhadap IPM, namun penelitian lain tidak memperoleh bukti yang signifikan (Suhyanto *et al.*, 2020; Pratama *et al.*, 2025; Sulastri & Efendri, 2021; Sahlan *et al.*, 2022; Anggraini, 2024; Simarmata & Iskandar, 2022; Pasaribu *et al.*, 2025; A. Putri *et al.*, 2024). Selain itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap IPM memiliki pengaruh yang signifikan (Rinawati *et al.*, 2022; Izzah & Hendarti, 2021; Siagian *et al.* 2024). Beberapa penelitian juga menunjukkan UMK berpengaruh signifikan terhadap IPM (Jahang *et al.*, 2024; Herman, 2021).

Ketidakselarasan hasil penelitian pada variabel realisasi PAD dan investasi mengindikasikan bahwa keterkaitan antara faktor ekonomi daerah dan pembangunan manusia masih belum memperoleh penjelasan empiris yang konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang

memerlukan pengkajian lebih mendalam, terutama terkait pengaruh realisasi PAD dan investasi terhadap IPM pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Bali yang memiliki karakteristik ekonomi berbasis pariwisata serta kecenderungan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Adapun kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan realisasi PAD sebagai indikator yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang telah terealisasi secara aktual, berbeda dengan sejumlah penelitian terdahulu yang lebih banyak menggunakan PAD dalam bentuk agregat. Selain itu, penelitian ini menganalisis pengaruh realisasi PAD, PDRB, UMK, dan investasi terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2018–2024 dengan mempertimbangkan adanya perbedaan struktur ekonomi antarwilayah.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur mengenai pembangunan manusia, khususnya pada wilayah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pariwisata sebagai sektor utama penggerak perekonomian daerah. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, terarah, dan berorientasi pada pemerataan hasil pembangunan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menguji pengaruh antarvariabel. Wilayah yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali, dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak sembilan dan rentang tahun pengamatan yaitu tujuh tahun (2018–2024). Maka dari itu, titik pengamatan berjumlah 63. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari publikasi Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Direktorat Jenderal Keuangan. Penelitian ini

mengaplikasikan teknik regresi data panel dalam analisis data yang didahului oleh analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran awal terhadap karakteristik data yang digunakan. Persamaan model regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 LN_X_{1it} + \beta_2 LN_X_{2it} + \beta_3 LN_X_{3it} + \beta_4 LN_X_{4it} + \dots \dots \dots \text{Persamaan 1}$$

Selanjutnya dilakukan pemilihan model panel antara *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* (Wooldridge, 2016: 434). Penentuan model panel dilakukan dengan Uji Chow, Hausman, serta Lagrange Multiplier. Tahapan berikutnya adalah pengujian asumsi klasik yaitu pengujian normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. (Gujarati & Porter, 2009:133). Pada tahap pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan Uji F untuk menilai pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen, sementara Uji t digunakan untuk mengkaji pengaruh parsial setiap variabel independen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2018:190), statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik data melalui perhitungan *mean*, *median*, maksimum, minimum, erta standar deviasi, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	LN_Y	LN_X ₁	LN_X ₂	LN_X ₃	LN_X ₄
Mean	75,2459	888,1165	27.852,44	2.615.230	1.950.983
Median	74,0400	363,3700	23.681,30	2.563.364	598.651
Max	85,2200	7.507,00	75.098,20	3.318.628	18.893.319
Min	66,4900	104,3300	6.490,23	2.128.253	3.124
Std.	5,2675	1.423,774	18.412,46	255.837,1	3.169.848
Dev					
Obs	63	63	63	63	63

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2026

Mengacu pada hasil di atas, terlihat variabel IPM (LN_Y) memiliki nilai terendah yaitu 66,49 yang berasal dari Kabupaten Karangasem pada tahun 2018 dan nilai maksimum 85,22 yang berasal dari Kota Denpasar pada tahun 2024. Dengan rata-rata adalah 75,24, nilai *median* 74,04, dan standar deviasi 5,26, menunjukkan bahwa tingkat IPM di kabupaten/kota Provinsi Bali berada

pada kategori yang relatif baik, namun masih terdapat perbedaan capaian antar wilayah. Variabel Realisasi PAD (LN_X_1) memiliki nilai minimum 104,3300 yang berasal dari Kabupaten Bangli pada tahun 2020 dan nilai maksimum 7.507,00 yang berasal dari Kabupaten Badung pada tahun 2024. Dengan rata-rata 888.116, *median* 363,3700, dan standar deviasi 1.423,774. Perbedaan antara nilai rata-rata dan median menunjukkan adanya distribusi data yang tidak merata, yang mencerminkan bahwa sebagian daerah memiliki kapasitas penerimaan daerah yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya.

Variabel PDRB (LN_X_2) memiliki nilai minimum 6.490,23 yang berasal dari Kabupaten Bangli pada tahun 2018 dan nilai maksimum 75.098,20 yang berasal dari Kabupaten Badung pada tahun 2024. Dengan rata-rata 27.852,44, *median* 23.681,30, dan standar deviasi 18.412,46. Rentang nilai yang cukup besar menunjukkan adanya perbedaan tingkat aktivitas ekonomi antar wilayah. Variabel UMK (LN_X_3) memiliki nilai minimum 2.128.253 yang berasal dari Kabupaten Bangli pada tahun 2018 dan nilai maksimum 3.318.628 yang berasal dari Kabupaten Badung pada tahun 2024. Dengan rata-rata 2.615.230, *median* 2.563.364, dan standar deviasi 255.837,1. Perbedaan yang relatif kecil antara nilai rata-rata dan median menunjukkan bahwa distribusi upah relatif lebih merata dibandingkan variabel lainnya. Variabel Investasi (LN_X_4) memiliki nilai minimum 3.124 yang berasal dari Kabupaten Bangli pada tahun 2019 dan nilai maksimum 18.893.319 yang berasal dari Kabupaten Badung pada tahun 2024. Dengan rata-rata 1.950.983, *median* 598.651, dan standar deviasi 3.169.848. Perbedaan yang cukup besar antara nilai rata-rata dan median menunjukkan bahwa distribusi investasi cenderung terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu.

Hasil Pemilihan Model Regresi

Dalam melakukan regresi, dilakukan transformasi data ke dalam logaritma natural (ln) pada variabel bebas. Menurut Gujarati & Porter (2009), transformasi ln bertujuan mengompresi skala data dan memperkecil

rentang nilai yang besar sehingga hubungan antarvariabel menjadi linier.

Uji Chow

Guna menentukan model antara *fixed effect* dan *common effect*. Berikut hasil pengujian:

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effect Test	Probability
Cross-section F	0,0000
Cross-section Chi-square	0,0000

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Nilai *probability cross-section F* pada tabel di atas yaitu $0,000 <$ dari taraf signifikansi 5%, jadi model regresi yang dipilih adalah *fixed effect*. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Uji Hausman.

Uji Hausman

Guna menentukan model antara *fixed effect* dan *random effect*. Berikut hasil pengujian:

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Probability
Cross-section random	0,4995

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil pengujian, *p-value cross-section random* yaitu 0,4995, melebihi taraf signifikansi 5%. Jadi, model regresi yang terpilih yaitu *random effect* dan dilakukan Uji Lagrange Multiplier guna memastikan pemilihan *random effect* atau *common effect*.

Uji Lagrange Multiplier

Guna menentukan model antara *random effect* dan *common effect*. Berikut hasil pengujian:

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Indicator	Cross-section
Breusch-Pagan	166.9240 (0,0000)

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

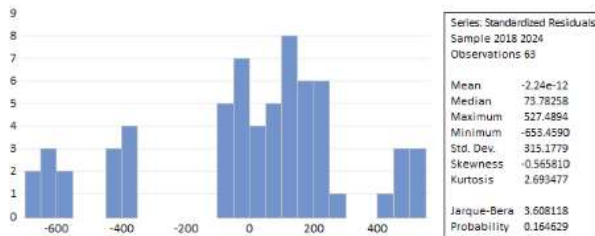
Nilai *probability Breusch-Pagan* pada hasil pengujian di atas yaitu 0,0000, lebih rendah dari taraf signifikansi 5 % sehingga model terpilih yaitu *random effect*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Adapun hasil pengujian ditampilkan sebagai berikut:

Uji Normalitas

Guna menilai pola distribusi residual pada model regresi (Gujarati & Porter, 2009:133). Berikut hasil pengujian:



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Nilai probabilitas Jarque–Bera (JB) pada gambar di atas sebesar $0,164 >$ dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Dilakukan guna melihat korelasi antar variabel bebas (Gujarati & Porter, 2009:337). Berikut hasil pengujian:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	762587,7	57,21166	NA
LN_X ₁	782,5260	7,089944	4,881612
LN_X ₂	7818.161	64,35238	5,632955
LN_X ₃	0,355653	59,94586	1,722899
LN_X ₄	0,001920	1,387409	1,130639

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Setiap variabel bebas pada Tabel memiliki *Centered* VIF < 10. Jadi, model regresi terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Guna melihat ketidaksamaan varians residual antar pengamatan (Gujarati & Porter, 2009:365). Hasil pengujian disajikan berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probability
C	566.5542	764.4992	0.741079	0.4616
LN_X ₁	3.590284	24.10574	0.148939	0.8821
LN_X ₂	-107.4692	74.37516	-1.444961	0.1539
LN_X ₃	0.482854	0.522592	0.923959	0.3593
LN_X ₄	0.010582	0.038824	0.272567	0.7862

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Seluruh *p-value* variabel bebas pada Tabel melebihi 0,05, jadi model tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Guna melihat hubungan residual antar periode pengamatan dari tahun ke tahun (Gujarati & Porter, 2009: 412). Menurut Singgih Santoso (2010:213), nilai Durbin-Watson berapa pada rentang -2 hingga +2 menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi. Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Weighted Statistics	
Durbin-Watson Stat	1,187136

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,187136 berada pada rentang -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya autokorelasi.

Hasil Pemilihan Regresi

Hasil regresi dengan *random effect model* (REM) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Regresi Dengan REM

Variable	Coef.	Std. Error	t-stat	Prob.
C	-6672,597	873,2627	7,640996	0,0000
LN_X ₁	0,529088	27,97367	0,018914	0,9850
LN_X ₂	396,0120	88,42036	4,478742	0,0000
LN_X ₃	6,898280	0,596367	11,56718	0,0000
LN_X ₄	0,031118	0,043820	0,710140	0,4805

R-Square 0.907563

Adjusted R-Square 0.901188

F-statistic 142.3634

Prob (F-Statistic) 0.000000

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil olah data di atas, diperoleh persamaan berikut:

$$Y_{it} = -6672,597 + 0,529LN_X_{1it} + 396,012LN_X_{2it} + 6,898LN_X_{3it} + 0,031lnN_{it} + e \dots\dots\dots(Persamaan 2)$$

1. Nilai konstanta (α) -6672,597 menunjukkan bahwa ketika variabel bebas diasumsikan konstan, maka IPM (Y) berada pada nilai -6672,597.
2. Koefisien Realisasi PAD (LN_X₁) sebesar 0,529 bertanda positif, yang berarti

- kenaikan 1 persen PAD, meningkatkan IPM sebesar 0,00529 poin, *ceteris paribus*.
3. Koefisien PDRB (LN_X₂) sebesar 396,012 bertanda positif, yang menunjukkan bahwa peningkatan 1 persen PDRB juga menyebabkan kenaikan IPM sebesar 3,96012 poin, *ceteris paribus*.
 4. Koefisien UMK (LN_X₃) sebesar 6,898 bertanda positif, sehingga kenaikan 1 persen UMK meningkatkan IPM 0,06898 poin, *ceteris paribus*.
 5. Koefisien Realisasi Investasi (LN_X₄) sebesar 0,031 bertanda positif, yang berarti kenaikan 1 persen investasi meningkatkan IPM sebesar 0,00031 poin, *ceteris paribus*.

Hasil Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8, *p-value* F-statistik (0,000000) lebih rendah dari taraf signifikansi 5% dan $F_{hitung} 142,363 > F_{tabel} 2,53$, sehingga realisasi PAD, PDRB, UMK, dan investasi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM di wilayah kabupaten/kota Provinsi Bali.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji t diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Realisasi PAD (LN_X₁) memiliki koefisien 0,529 dengan *p-value* (0,9805) lebih tinggi dari taraf signifikansi 5%, serta $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,018914) < 2,00172). Hal tersebut menggambarkan bahwa Realisasi PAD memberikan pengaruh positif terhadap IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali, namun tidak signifikan.
2. PDRB (LN_X₂) memiliki koefisien 396,012 dan *p-value* (0,0000) lebih kecil dari 5%, serta $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,478742 > 2,00172), menunjukkan bahwa IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh PDRB.
3. UMK (LN_X₃) memiliki koefisien 6,898 dengan *p-value* (0,0000) lebih rendah dari 5%, serta $t_{hitung} > t_{tabel}$ (11,56718 > 2,00172), menunjukkan bahwa IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh UMK.
4. Investasi (LN_X₄) memiliki koefisien 0,031 dengan *p-value* (0,4805) lebih tinggi

dari taraf signifikansi 5%, serta $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,710140 < 2,00172). Hal tersebut menggambarkan bahwa investasi memberikan pengaruh positif terhadap IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali, meskipun tidak signifikan.

Hasil Koefisien Determinasi

Ditujukan dari besaran *Adjusted R-square* yaitu 0.901, mengindikasikan 90,1% variabel bebas yang ada pada model mampu menjelaskan IPM, sementara 9,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil Variabel Dominan

Berdasarkan hasil uji t, variabel yang memiliki koefisien tertinggi adalah PDRB (LN_X₂) yaitu sebesar 396.0120. Dengan demikian, PDRB merupakan variabel yang memiliki pengaruh terbesar dalam memengaruhi variabel terikat yaitu IPM (LN_Y) dibandingkan dengan variabel bebas lainnya dalam model regresi. Hal tersebut juga menggambarkan bahwa setiap perubahan pada PDRB memberikan pengaruh yang relatif paling besar terhadap perubahan IPM (LN_Y).

PEMBAHASAN

Temuan dari Uji F mengindikasikan bahwa Realisasi PAD, PDRB, UMK, serta investasi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2018-2024. Temuan ini mendukung teori pembangunan ekonomi oleh Todaro & Smith (2012:5), yang memandang pembangunan sebagai proses multidimensional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, hasil penelitian juga konsisten dengan teori Musgrave (1998:7) mengenai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi pemerintah yang tercermin melalui pemanfaatan PAD dan investasi untuk penyediaan layanan publik, kebijakan UMK sebagai instrumen pemerataan pendapatan, serta stabilitas pertumbuhan PDRB. Hasil ini juga mendukung teori *Human Capital* oleh Becker (1993:98), yang menunjukkan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, di mana peningkatan realisasi

PAD, PDRB, UMK, dan investasi memperkuat kapasitas ekonomi daerah, mendorong pembukaan lapangan kerja serta peningkatan mutu sumber daya manusia.

Selanjutnya, hasil uji parsial menunjukkan Realisasi PAD (LN_X_1) memiliki arah positif, namun tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat IPM di kabupaten dan kota Provinsi Bali periode 2018–2024. Meskipun realisasi PAD secara teori dapat diimplementasikan untuk mendukung pembangunan di dimensi pendidikan, kesehatan, dan sektor layanan masyarakat, temuan ini menunjukkan bahwa perannya dalam mendorong peningkatan IPM di Provinsi Bali belum optimal. Kondisi ini antara lain akibat ketergantungan PAD pada sektor yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata, di mana sektor tersebut tidak merata di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Bali, melainkan hanya terfokus pada beberapa wilayah seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar, sementara kabupaten lainnya seperti Karangasem, Bangli, dan Jembrana memiliki tingkat aktivitas pariwisata yang rendah. Hal tersebut selanjutnya menimbulkan ketimpangan penerimaan pendapatan daerah yang berakibat pada perbedaan kemampuan fiskal daerah dalam pembiayaan layanan publik (Badan Pusat Statistik, 2025). Kondisi ketimpangan tersebut juga sejalan dengan temuan Jahang *et al.* (2024), yang menunjukkan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan serta keterbatasan akses dan infrastruktur layanan publik dapat menyebabkan peningkatan PAD tidak serta-merta berdampak pada peningkatan IPM, karena manfaat pembangunan tidak terdistribusi secara merata di seluruh wilayah.

Selain itu, tidak signifikannya pengaruh realisasi PAD terhadap IPM juga dapat dipahami sebagai kondisi yang serupa dengan temuan Anggraini (2024) pada konteks wilayah lain, yang menunjukkan bahwa perbedaan kontribusi PAD antarwilayah serta ketimpangan struktur penerimaan daerah dapat menyebabkan pengaruh PAD terhadap indikator pembangunan manusia menjadi kurang optimal. Ketidakseimbangan tersebut

mengindikasikan bahwa peningkatan PAD tidak selalu diikuti oleh peningkatan IPM secara langsung apabila distribusi dan efektivitas alokasinya belum merata.

Selain itu, tidak signifikannya pengaruh realisasi PAD terhadap IPM juga dapat dijelaskan melalui teori *Human Capital* oleh Becker (1993:98), yang menjelaskan bahwa investasi pada kualitas sumber daya manusia memerlukan waktu (*time lag*) sebelum memberikan dampak yang nyata. Realisasi PAD yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik tidak secara langsung meningkatkan IPM dalam jangka pendek karena program-program tersebut memerlukan proses implementasi dan penyesuaian yang berlangsung bertahap. Oleh karena itu, dalam periode penelitian 2018–2024, dampaknya belum cukup kuat terlihat secara statistik, sehingga pengaruhnya terhadap IPM cenderung baru akan muncul dalam jangka menengah hingga panjang.

Hasil empiris dalam penelitian ini mendukung temuan Sahlan *et al.* (2022), Anggraini (2024), dan Aini *et al.* (2025) bahwa realisasi PAD memiliki arah positif, tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan PAD serta pemerataan alokasinya menjadi faktor penting dalam meningkatkan kontribusi PAD terhadap pembangunan manusia di daerah, termasuk di Provinsi Bali.

Selanjutnya, hasil pengujian parsial menunjukkan PDRB (LN_X_2) mempunyai arah positif dan juga pengaruh yang signifikan terhadap tingkat IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali pada 2018–2024 serta menjadi variabel dominan dibandingkan variabel independen lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik (2025), peningkatan PDRB mencerminkan menguatnya aktivitas ekonomi, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat yang bersumber dari struktur perekonomian Bali yang beragam sesuai potensi wilayah masing-masing, sehingga secara nyata meningkatkan kemampuan masyarakat yang menjadi faktor utama dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar,

termasuk pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui mekanisme bahwa peningkatan *output* ekonomi akan berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat, yang kemudian diikuti oleh peningkatan daya beli. Daya beli masyarakat yang lebih tinggi berkontribusi dalam meningkatkan IPM, karena merupakan salah satu komponen penting yang mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia, khususnya melalui indikator pengeluaran atau pendapatan riil per kapita (Rinawati *et al.*, 2022). Oleh karena itu, semakin tinggi PDRB maka semakin besar pula kemampuan ekonomi masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Dominannya pengaruh PDRB dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang lebih besar dibandingkan variabel lainnya dalam mendorong pembangunan manusia. Hal tersebut menggambarkan semakin meningkatnya *output* ekonomi menjadi faktor penting yang secara langsung atau tidak memengaruhi berbagai dimensi IPM, baik melalui peningkatan pendapatan masyarakat maupun melalui peningkatan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan. Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian Si'lang *et al.* (2019) yang mengemukakan bahwa PDRB merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap IPM.

Hasil tersebut memperkuat teori pembangunan ekonomi oleh Todaro & Smith (2012:5) yang memandang pembangunan sebagai proses multidimensional yang bukan semata-mata berorientasi pada aspek pertumbuhan ekonomi, melainkan turut mengarah pada peningkatan kesejahteraan, relevan juga dengan teori fungsi stabilisasi pemerintah oleh Musgrave (1989:7) yang menekankan pentingnya pertumbuhan dan stabilitas *output* regional. Secara empiris, peran PDRB dalam meningkatkan IPM juga sejalan dengan temuan Rinawati *et al.* (2022), Izzah & Hendarti (2021), Sudana & Sudarsani (2021), dan Siagian *et al.* (2024), bahwa

PDRB memiliki arah positif serta berpengaruh signifikan terhadap tingkat IPM.

Pengujian parsial juga memperlihatkan UMK (LN_X₃) memiliki arah positif dan signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali pada 2018–2024, mengindikasikan bahwa peningkatan UMK berperan penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat, khususnya tenaga kerja, dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Dalam pengukuran IPM, Badan Pusat Statistik (2025) menyatakan bahwa dimensi standar hidup layak tercermin dari rata-rata pengeluaran riil per kapita sebagai indikatornya, sehingga kenaikan UMK mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli pekerja, yang selanjutnya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya.

Hal ini juga dapat dijelaskan melalui temuan Jahang *et al.* (2024), yang menemukan bahwa semakin meningkatnya upah minimum berkontribusi terhadap meningkatnya daya beli masyarakat, sehingga mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan IPM secara keseluruhan. Oleh karena itu, UMK tidak hanya berperan sebagai standar pengupahan, tetapi juga sebagai instrumen yang memengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemampuan ekonomi tenaga kerja.

Temuan ini relevan juga dengan teori fungsi pemerintah oleh Musgrave (1989:7) yang menekankan peran distribusi, di mana UMK sebagai instrumen pemerataan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta konsisten dengan teori *Human Capital* oleh Becker (1993:98) yang menegaskan pentingnya penanaman modal melalui peningkatan pendapatan pada kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini menghasilkan temuan yang mendukung hasil studi Jahang *et al.* (2024) dan Herman (2021) yaitu UMK memiliki arah positif dan signifikan dalam memengaruhi IPM.

Selanjutnya, hasil penelitian secara parsial menggambarkan Investasi (LN_X₄)

mempunyai arah positif, namun pengaruhnya tidak signifikan terhadap IPM di kabupaten dan juga kota Provinsi Bali pada 2018–2024. Penelitian ini turut memberikan indikasi di mana investasi walaupun dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi, dampaknya terhadap IPM di Provinsi Bali belum optimal, antara lain disebabkan oleh pola investasi yang masih terkonsentrasi pada wilayah dan sektor tertentu, khususnya sektor pariwisata di wilayah selatan Bali, serta dominasi Penanaman Modal Asing yang berorientasi pada kepentingan bisnis sehingga dampak positifnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh daerah (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2025).

Selain itu, tidak signifikannya pengaruh investasi terhadap IPM juga dapat dijelaskan melalui teori *Human Capital* oleh Becker (1993:98) yaitu adanya efek jeda waktu (*time lag*), di mana manfaat dari investasi terhadap meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memerlukan waktu sebelum dapat tercermin secara nyata dalam indikator IPM, karena proses penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, serta pemerataan manfaat ekonomi terjadi secara bertahap. Dengan demikian, dalam periode penelitian, dampaknya belum cukup signifikan terlihat secara statistik dan cenderung baru akan muncul dalam jangka menengah hingga panjang.

Penelitian yang dilakukan Pasaribu *et al.* (2025) serta A. Putri *et al.* (2024), juga menemukan investasi berpengaruh positif terhadap IPM tetapi tidak signifikan, sehingga menunjukkan perlunya pemerataan dan peningkatan kualitas investasi agar kontribusinya terhadap peningkatan IPM di Provinsi Bali dapat lebih optimal.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian tersebut memberikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Realisasi PAD, PDRB, UMK, dan Investasi secara serempak memiliki pengaruh yang positif terhadap IPM kabupaten dan juga kota yang terdapat di Provinsi Bali, karena keempat

variabel tersebut secara bersama-sama mencerminkan kapasitas fiskal daerah, aktivitas ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat, serta dinamika investasi yang saling mendukung dalam meningkatkan kualitas hidup. Secara parsial, PDRB serta UMK terbukti memiliki arah positif dan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Peningkatan aktivitas perekonomian serta pendapatan tenaga kerja secara langsung memperkuat daya beli serta kemudahan masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup memadai. Sementara itu, Realisasi PAD dan investasi memberikan pengaruh positif tetapi tidak signifikan, yang mencerminkan terdapat ketimpangan antarwilayah dan konsentrasi sektor tertentu, dengan demikian dampaknya belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari seluruh variabel yang dianalisis, PDRB menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap IPM karena mencerminkan kinerja ekonomi daerah secara menyeluruh yang mampu mendorong peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

V. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PAD melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal dan mengarahkan pemanfaatannya pada sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan standar hidup masyarakat. Mengingat dominannya pengaruh PDRB terhadap IPM, pemerintah daerah juga perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan sektor produktif yang berpotensi menciptakan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Penetapan UMK perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah serta diimbangi dengan pengawasan dan kebijakan pendukung bagi dunia usaha agar dapat berkontribusi terhadap kemampuan ekonomi dan kualitas hidup. Selain itu, kebijakan investasi baik PMA maupun PMDN perlu diarahkan secara lebih merata dan sesuai dengan karakteristik wilayah agar manfaat investasi dapat dirasakan secara luas

dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan IPM. Peneliti mendatangkan dianjurkan untuk menambahkan variabel, seperti bantuan sosial, DAU, DAK, atau sektor unggulan, serta memperluas wilayah penelitian, sebagai upaya memperdalam pemahaman secara lebih luas terhadap determinan penentu IPM.

VI. REFERENSI

- Aini, L., Ananda, N., Putri, R., Nasution, A., Sari, P., & Julianty, M. (2025). The Influence of Local Own- Source Revenue and Unemployment On Labor Force Through Human Development Index (HDI). *Balance Jurnal Ekonnomi*, 21(1), 34–42. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jeb>
- Anggraini, J. (2024). The Effect of Total Unemployment, Regional Minimum Wage, Population Density and Original Local Government Revenue to Human Development Index in Special Region of Yogyakarta 2014-2021. *Efficient*, 7(1), 32–43. <https://doi.org/10.15294/2v8tyh91>
- Astari, S., & Chotib. (2024). Spatial Analysis of The Human Development Index in Indonesia Before and During The Covid-19 Pandemic. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1291(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1291/1/012002>
- Aswin, N., & Yasa, I. (2021). Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota DI PROVINSI BALI. *E-Jurnal EP Unud*, 10(11), 4535–4562. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/76253/42090>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah)*. BPS Bali. Denpasar. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks pembangunan manusia menurut provinsi 2024*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks pembangunan manusia Provinsi Bali menurut kabupaten/kota*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Provinsi Bali menurut lapangan usaha 2020–2024*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Produk domestik regional bruto Provinsi Bali menurut lapangan usaha 2020–2024*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Provinsi Bali dalam angka 2020*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Realisasi investasi PMA di Provinsi Bali menurut kabupaten/kota*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Realisasi investasi PMDN di Provinsi Bali menurut kabupaten/kota*. <https://www.bps.go.id>
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis data panel dalam penelitian ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali. (2025). *Upah minimum kabupaten/kota Provinsi Bali*. <https://disnaker.baliprov.go.id>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/provinsi Bali periode 2018–2024*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Fitria, D. N. (2024). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Harapan Hidup, dan Harapan Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta Tahun 2010-2023. *Jpek (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 8(3), 1170–1178. <https://doi.org/10.29408/jpek.v8i3.28270>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas

- Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Herman. (2021). Impact of Inflation and City Minimum Wages on Human Development Index in Indonesia. *Husnayain Business Review*, 1(1), 78–86. <https://doi.org/10.54099/hbr.v1i1.5>
- Izzah, C., & Hendarti, I. (2021). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 1(2), 87–100. <https://doi.org/10.23969/oikos.v5i2.339>
- Jahang, P. A., Wenehen, F. Y. A., Rara, A. T., & Manduapessy, R. L. (2024). Analisis Pengaruh PAD, Pengeluaran Pemerintah, dan UMK Terhadap IPM di Kabupaten Mimika. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 9005–9013. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10779>
- Karimah, F., Harsono, I., Endang Astuti, Himawan Sutanto, & Ida Ayu Putri Suprapti. (2024). Pengaruh PDRB Per Kapita, IPM dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (2020-2022). *Lancah: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 2(1), 99–105. <https://doi.org/10.35870/ljit.v2i1.2241>
- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. *Revenue Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2(2), 95–112. <https://doi.org/10.24042/revenue.v2i2.9071>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.
- Pasaribu, J. R. S., Manik, C. W., Silaban, K., Manurung, M. P., & Silaban, P. S. M. J. (2025). Analisis Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 4(1), 519–530. <https://doi.org/10.57235/jetish.v4i1.4307>
- Pratama, N. S., Hamzani, U., Muhsin, M., Rusliyawati, R., & Karpriana, A. P. (2025). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 4(1), 16–26. <https://doi.org/10.56916/jimab.v4i1.1080>
- Putri, A., Zrndrato, F., Ruslan, D., & Sari, R. (2024). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Index Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. *Ekuilnomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 46–52. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v6i1.880>
- Putri, S. S., Salim, A., Ramadhona, F., Lubis, A., & Dahlan, U. A. (2024). *Analysis of Human Development Index in ASEAN : A Panel Model*. September. <https://www.researchgate.net/publication/n/384269129>
- Radityana, I., Djayastra, I., Danendra, A., & Murthi, N. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Manajemen Indonesia (JKEMI)*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/10.61079/jkemi.v1i1.3>
- Rinawati, Y., Aulia, F., Miftitah, N., Aldianto, F. A., & Hafidz, M. (2022). Pengaruh PDRB , Kemiskinan , dan Jumlah Penduduk Terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021. *Jurnal Ecogen*, 5(4), 517–527. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v5i4.14054>
- Sahlan, E., Yusuf, Y., & Susanto, D. (2022). Pengaruh Pendataan Asli Daerah (Pad) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm). *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan*

- Administrasi*, 4(1), 18–22.
<https://doi.org/10.58258/jihad.v4i1.4592>
- Santika, I., & Anandari, I. (2025). Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Capitalis: Journal of Social Science*, 2(3), 47–66. <https://jutepe-joln.net/index.php/CAPITALIS/article/download/165/164>
- Santoso, S. (2010). *Statistik multivariat: Konsep dan aplikasi dengan SPSS*. Jakarta, Indonesia: PT Elex Media Komputindo.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). Wiley.
- Si'lang, I., Hasid, Z., & Priyagus. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Manajemen*, 11(2), 159–169. <https://doi.org/10.30872/jmmn.v11i2.5953>
- Siagian, Y., Hidayat, N., Gultom, G. A. M., Belcha, D., & Sipahutar, J. N. (2024). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau Tahun 2010-2022. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(2), 1397–1403. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i2.2615>
- Simarmata, Y. W., & Iskandar, D. D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Penduduk, Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia: Analisa Two Stage Least Square untuk Kasus Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 78–94. <https://doi.org/10.14710/jdep.5.1.78-94>
- Sudana, S. N., & Sudarsani, N. P. (2021). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali. *Majalah Ilmiah Untab*, 18(2), 240–248. <https://ejournal.universitastaban.ac.id/index.php/majalah-ilmiah-untab/article/view/136>
- Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). Pengaruh Dana Transfer Dana Desa Dan Pad Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(3), 285–305. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4478>
- Sulastri, E., & Efendri, E. (2021). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap indeks pembangunan manusia seluruh provinsi di Kalimantan tahun anggaran 2015-2019. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 85–96. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i2.572>
- Suparman, S., & Muzakir, M. (2023). Regional inequality, human capital, unemployment, and economic growth in Indonesia: Panel regression approach. *Cogent Economics and Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2251803>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development* (11th ed.). Pearson Education.
- United Nations Development Programme. (2023). *Human development report*. <https://hdr.undp.org>
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory econometrics: A modern approach* (6th ed.). Cengage Learning